

Jaminan Mutu Pendidikan: Dampak Kebijakan terhadap Hasil Belajar Mahasiswa

Tamba Parulian

Sekolah Tinggi Teologi Kadesi Yogyakarta, tambaparulian1105@gmail.com

Masuk 29 September 2025	Diterima 10 Desember 2025	Terbit 29 Desember 2025
-------------------------	---------------------------	-------------------------

DOI Crossref: <https://doi.org/10.63436/bejap.v4i2.146>



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

Abstract

This study examines the implementation of Quality Assurance (QA) in schools providing education for students with special needs during the COVID-19 pandemic, with a focus on planning, implementation, and evaluation within the framework of school accreditation. The study also explores school leaders' perceptions of QA as a form of institutional accountability. The analysis refers to the standards of the National Accreditation Board for Schools/Madrasahs (BAN-S/M, 2022), which emphasize four main components: graduate competence, teaching and learning processes, teacher qualifications, and school management. As global demands for educational competitiveness continue to increase, the Indonesian government has encouraged educational institutions to pursue accreditation. This policy has raised strategic issues related to the authority of accreditation bodies, the harmonization of local and global quality assurance standards, and the mutual recognition of accreditation outcomes. This study analyzes the national accreditation framework in Indonesia, the role of BAN-S/M, and the challenges posed by the pandemic to educational institutions and the national quality assurance system. The findings indicate that the planning and implementation of QA in inclusive education were carried out in a structured, adaptive, and participatory manner, involving educators and community stakeholders. Evaluation processes continued despite resource limitations and changes in learning modalities. The results underscore the importance of sustaining quality assurance to maintain educational quality and public trust. Furthermore, this study provides empirical contributions to the development of quality assurance systems in inclusive education and offers policy implications for accreditation reform and sustainable quality improvement in Indonesia. The findings also highlight the importance of cross-sector collaboration, the use of flexible

learning technologies, strengthened school leadership, and crisis preparedness to ensure that quality governance remains effective, equitable, and responsive to the needs of students with special needs in future national and global emergency contexts in a sustainable, inclusive, adaptive, holistic, and equitable manner.

Keywords: *quality assurance, policy, inclusive education, student learning outcomes, Indonesia*

Abstrak

Penelitian ini membahas penerapan Jaminan Kualitas (JK) di sekolah penyelenggara pendidikan bagi siswa berkebutuhan khusus selama pandemi COVID-19 dengan fokus pada perencanaan, implementasi, dan evaluasi dalam kerangka akreditasi sekolah. Studi ini juga mengeksplorasi persepsi pimpinan sekolah terhadap JK sebagai bentuk akuntabilitas institusional. Analisis mengacu pada standar Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah (BAN-S/M, 2022) yang menekankan empat komponen utama, yaitu kompetensi lulusan, proses pembelajaran dan pengajaran, kualifikasi guru, serta manajemen sekolah. Seiring meningkatnya tuntutan global terhadap daya saing pendidikan, pemerintah Indonesia mendorong lembaga pendidikan untuk memperoleh akreditasi. Kebijakan ini memunculkan isu strategis terkait kewenangan lembaga akreditasi, harmonisasi standar jaminan mutu lokal dan global, serta pengakuan timbal balik hasil akreditasi. Penelitian ini menganalisis kerangka akreditasi nasional di Indonesia, peran BAN-S/M, serta tantangan pandemi terhadap lembaga pendidikan dan sistem jaminan mutu nasional. Temuan menunjukkan bahwa perencanaan dan pelaksanaan JK pada pendidikan inklusif dilakukan secara terstruktur, adaptif, dan partisipatif dengan melibatkan pendidik dan pemangku kepentingan masyarakat. Evaluasi tetap dilaksanakan meskipun terdapat keterbatasan sumber daya dan perubahan moda pembelajaran. Hasil penelitian menegaskan pentingnya keberlanjutan jaminan kualitas untuk menjaga mutu pendidikan dan kepercayaan publik. Selain itu, studi ini memberikan kontribusi empiris bagi pengembangan sistem jaminan kualitas pendidikan inklusif serta implikasi kebijakan untuk reformasi akreditasi dan peningkatan mutu pendidikan berkelanjutan di Indonesia. Temuan ini juga menyoroti pentingnya kolaborasi lintas sektor penggunaan teknologi pembelajaran fleksibel penguatan kepemimpinan sekolah serta kesiapsiagaan krisis agar tata kelola mutu tetap efektif adil dan responsif terhadap kebutuhan siswa berkebutuhan khusus pada situasi darurat di masa depan nasional dan global berkelanjutan inklusif adaptif holistik berkeadilan.

Kata kunci: jaminan mutu, kebijakan, pendidikan inklusif, hasil belajar siswa, Indonesia

Pendahuluan

Kesuksesan lembaga pendidikan sangat bergantung pada implementasi program dan layanan yang berorientasi pada kualitas. Jaminan mutu dalam pendidikan tidak hanya meningkatkan hasil akademik tetapi juga memperkuat kredibilitas institusi dan kepercayaan pemangku kepentingan. Seperti yang ditekankan oleh Chen dan Hou (2016) serta Ho (1999), kualitas layanan pendidikan secara langsung mempengaruhi keunggulan institusi. Dalam lingkungan pendidikan yang kompetitif dan dinamis saat ini, prinsip "*kualitas terlebih dahulu*" bukan

lagi pilihan, melainkan keharusan untuk keberlanjutan dan relevansi global (Melão & Gamboa, 2020; To et al., 2012).

Perkembangan pesat kesempatan pendidikan—terutama di tengah transformasi digital yang dipercepat oleh pandemi COVID-19—telah memperkuat kekhawatiran tentang konsistensi dan efektivitas kualitas pendidikan. Mekanisme internal tradisional pengendalian kualitas, yang sering diatur secara eksklusif oleh lembaga nasional, semakin dilengkapi (atau bahkan digantikan) oleh model jaminan kualitas eksternal. Model-model ini dirancang untuk merespons massifikasi, kebutuhan belajar yang beragam, dan standar global (Baharun, Harun, & Basri, 2021; Suartini, 2019; UNESCO, 2021).

Selain itu, pandemi telah mengungkap ketidaksetaraan sistemik dan menantang tujuan dasar pendidikan yang berpusat pada peserta didik. Ketika siswa kehilangan kebebasan untuk berkembang sesuai dengan kapasitas pribadi mereka, proses pendidikan kehilangan fungsi emansipatorisnya. Seperti yang ditekankan oleh Freire (1996), pendidikan harus menjadi praktik kebebasan, bukan dominasi. Guru, oleh karena itu, memiliki tanggung jawab ganda untuk memberikan pengajaran yang efektif dan memfasilitasi pembelajaran yang membebaskan—memastikan bahwa siswa tidak dibatasi oleh pedagogi kaku atau batasan sistemik, tetapi diberdayakan untuk terlibat secara berarti dalam proses pembelajaran mereka sendiri (UNICEF, 2022; Jalal et al., 2020).

Pemeliharaan standar pendidikan yang tinggi sangat bergantung pada badan jaminan mutu eksternal (EQA) yang tidak hanya mengevaluasi institusi secara imparial tetapi juga menyeimbangkan penilaian internal (Chen & Hou, 2016). EQA umumnya menggabungkan audit eksternal yang direview oleh rekan sejawat dengan penilaian internal institusi, memastikan bahwa jaminan mutu mencerminkan perspektif internal dan eksternal (Rahminawati & Supriyadi, 2023).

Di luar pengajaran di kelas, guru diharapkan mematuhi etika profesional dan norma yang berlaku di bidangnya (Asemu et al., 2023; Damia & Maharani, 2023). Sekolah harus merancang sistem pembelajaran secara sengaja, bertujuan untuk mengembangkan kecerdasan spiritual, kapasitas intelektual, karakter pribadi, dan tanggung jawab sosial siswa (Aradea & Harapan, 2019). Akreditasi—mekanisme utama EQA—memverifikasi apakah sekolah memenuhi standar nasional untuk kualitas dan integritas institusional (Fauzi, 2021; Hoang et al., 2020; *Educational accreditation*, 2023).

Namun, perubahan demografi, pengurangan dana publik, transformasi digital yang dipercepat oleh COVID-19, dan pasar global telah mengubah ekspektasi pendidikan. Dalam konteks ini, strategi Manajemen Kualitas Total (TQM) diterapkan di berbagai sektor untuk meningkatkan daya saing melalui perbaikan berkelanjutan, didukung oleh masukan pemangku kepentingan dan keputusan berbasis data (Kuswanto & Anderson, 2021; Nurcahyo et al., 2019; *Philippine Quality Award*, 1998).

Undang-undang pendidikan Indonesia mewajibkan EQA di semua tingkatan—dari pendidikan dasar hingga tinggi—melalui lembaga seperti BAN-S/M dan BAN-PT/LAM, dengan menggunakan proses standar dan berulang untuk akreditasi (BAN-S/M, 2022; *Akreditasi Pendidikan*, 2023; Ishak, 2023). Prosedur ini mendorong transparansi dan

akuntabilitas, menjawab pertanyaan kebijakan dan kinerja melalui pengumpulan data sistematis dan tinjauan rutin (Fransiska, 2018; To dkk., 2012).

Akhirnya, akreditasi menciptakan lingkungan pembelajaran berkualitas tinggi dan kurikulum yang selaras dengan standar, mempersiapkan lulusan untuk tuntutan dunia kerja yang terus berkembang (Gamboa & Melão, 2012; Sasmito et al., 2020; Wang et al., 2018). Sekolah-sekolah di Indonesia diwajibkan oleh undang-undang untuk menerapkan EQA secara komprehensif, membangun kepercayaan melalui kualitas yang konsisten dan terukur—serta merespons kebutuhan nasional dan tren global (Rahminawati & Supriyadi, 2023; Ishak, 2023).

Metode

Penelitian ini menggunakan desain penelitian deskriptif kualitatif untuk mengeksplorasi implementasi Jaminan Mutu (QA) di sekolah-sekolah untuk siswa berkebutuhan khusus selama pandemi COVID-19. Pendekatan kualitatif dipilih untuk memfasilitasi pemahaman yang mendalam tentang bagaimana praktik QA—terutama perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi—dilaksanakan dalam proses akreditasi institusi di bawah batasan pandemi. Desain ini memungkinkan peneliti untuk mengamati fenomena dalam konteks alami dan menghasilkan wawasan yang kaya dan kontekstual berdasarkan pengalaman nyata berbagai pemangku kepentingan pendidikan (Creswell & Poth, 2018).

Penelitian ini disusun berdasarkan kerangka kerja akreditasi nasional yang disediakan oleh Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah (BAN-S/M, 2022), yang menguraikan indikator kualitas kunci untuk lembaga pendidikan. Secara spesifik, studi ini berfokus pada empat dimensi kritis: (1) *kompetensi lulusan*, (2) *kualitas proses pembelajaran*, (3) *kualifikasi guru dan pengembangan profesional*, dan (4) *tata kelola sekolah dan sistem administrasi*. Komponen-komponen ini berfungsi sebagai acuan analitis untuk mengevaluasi bagaimana QA diimplementasikan di sekolah-sekolah yang melayani siswa dengan kebutuhan pendidikan khusus selama periode gangguan pendidikan yang signifikan.

Untuk mengeksplorasi masalah penelitian secara komprehensif, studi ini mengadopsi strategi pengumpulan data, yang melibatkan (1) pengamatan langsung, dan (2) analisis dokumen. Metode-metode ini memungkinkan peneliti untuk memvalidasi temuan secara silang, sehingga meningkatkan keandalan dan kredibilitas interpretasi (Merriam & Tisdell, 2016; Yin, 2018).

Pengumpulan data dilakukan di sekolah khusus yang dipilih secara purposif. Sampling purposif digunakan untuk merekrut sepuluh informan kunci, termasuk tiga guru kelas, tiga orang tua siswa dengan kebutuhan khusus, dan empat siswa, yang dipilih berdasarkan keterlibatan langsung dan pengalaman mereka dalam praktik jaminan mutu (QA) di sekolah. Pengamatan dilakukan di lokasi, memungkinkan peneliti mencatat pola perilaku, interaksi, dan rutinitas institusional terkait implementasi QA. Pendekatan ini dipandu oleh instrumen pengamatan terstruktur yang dikembangkan untuk memastikan konsistensi dan fokus (Arikunto, 2013).

Setelah observasi, wawancara semi-terstruktur mendalam dilakukan untuk mengeksplorasi lebih lanjut persepsi, pengalaman, dan interpretasi peserta terkait aktivitas QA. Format wawancara memungkinkan fleksibilitas sambil tetap memastikan bahwa area

Tamba Parulian

tematik kunci—seperti peran kepemimpinan, perencanaan kolaboratif, dan tantangan selama pandemi—dibahas secara sistematis. Wawancara direkam secara audio dan ditranskrip untuk pengkodean kualitatif dan analisis tematik.

Selain itu, analisis dokumen digunakan untuk mengumpulkan data tambahan dari laporan institusional, termasuk laporan akreditasi sekolah, evaluasi QA internal (Evaluasi Diri Sekolah atau EDS), dan Rencana Kerja Sekolah (RKS). Dokumen-dokumen ini memberikan wawasan kontekstual penting tentang perencanaan institusional, target kinerja, dan kepatuhan terhadap standar QA nasional (BAN-S/M, 2022).

Untuk memastikan keandalan, studi ini mengikuti kriteria kredibilitas, transferabilitas, ketergantungan, dan konfirmasi (Lincoln & Guba, 1985). Kredibilitas ditingkatkan melalui triangulasi sumber data, keterlibatan yang mendalam di lapangan, dan verifikasi oleh peserta. Transferabilitas diatasi melalui deskripsi mendalam tentang konteks dan perspektif peserta. Ketergantungan dan konfirmasi didukung melalui jejak audit dan dokumentasi reflektif tentang keputusan analitis peneliti.

Akhirnya, pendekatan metodologis ini memungkinkan pemeriksaan holistik tentang bagaimana QA dilaksanakan dan dipersepsikan di lingkungan pendidikan khusus selama kondisi krisis, dengan menekankan interaksi antara kerangka kebijakan nasional, kepemimpinan sekolah, kolaborasi pemangku kepentingan, dan ketahanan institusional.

Komponen	Deskripsi
Pendekatan Penelitian	Kualitatif, deskriptif
Fokus Penelitian	Implementasi QA (perencanaan, pelaksanaan, evaluasi) di sekolah untuk siswa dengan kebutuhan khusus selama pandemi COVID-19
Kerangka Teori	Berbasis pada Standar Akreditasi Nasional (BAN-S/M, 2022): 1. Kompetensi Lulusan 2. Kualitas Proses Pembelajaran 3. Kualifikasi Guru 4. Tata Kelola Sekolah
Metode Pengumpulan Data	1. Pengamatan Langsung 2. Wawancara Semi-Struktur 3. Analisis Dokumen (misalnya, EDS, RKS, RKAS, Laporan Akreditasi)
Peserta	Sampling purposif terhadap 10 informan: 3 guru 3 orang tua 4 siswa dengan kebutuhan khusus
Alat Pengumpulan Data	Lembar observasi Panduan wawancara Daftar periksa tinjauan dokumen

Tamba Parulian

Komponen	Deskripsi
Analisis	Analisis tematik berdasarkan komponen jaminan mutu nasional; triangulasi data dari berbagai sumber
Kriteria Keandalan	Kredibilitas (triangulasi, verifikasi anggota) Transferabilitas (deskripsi mendalam) Keandalan & Konfirmasi (jejak audit, reflektivitas) Wawasan analitis tentang proses jaminan kualitas dan persepsi kepemimpinan dalam kondisi krisis
Hasil	

Gambar 1. Tabel Desain Penelitian

Hasil dan Pembahasan

Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan bagaimana Jaminan Mutu (QA) diterapkan di sekolah-sekolah untuk siswa dengan kebutuhan khusus selama pandemi COVID-19. Secara spesifik, penelitian ini mengeksplorasi bagaimana perencanaan, implementasi, dan evaluasi QA dilakukan sebagai bagian dari proses akreditasi sekolah, serta bagaimana pemimpin sekolah memandang QA sebagai wujud akuntabilitas institusional. Analisis ini didasarkan pada standar akreditasi yang diterbitkan oleh Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah (BAN-S/M, 2022), dengan fokus pada empat komponen utama: (1) Kualitas Lulusan, (2) Proses Pembelajaran, (3) Kualitas Guru, dan (4) Manajemen Sekolah.

Selama pandemi COVID-19, perencanaan Jaminan Mutu (QA) di sekolah yang melayani siswa dengan kebutuhan khusus berkembang menjadi prioritas institusional yang lebih terencana dan strategis. Pemimpin sekolah semakin menyadari bahwa QA bukanlah hasil sampingan yang muncul secara spontan dari operasional harian, melainkan proses terstruktur yang harus diintegrasikan secara sistematis ke dalam rencana pengembangan sekolah (Sugiyanta, 2016). Seiring dengan meningkatnya gangguan pendidikan, perencanaan QA menjadi mekanisme kritis untuk menjaga kohesi antara desain instruksional, alokasi sumber daya, dan sistem dukungan siswa. Sesuai dengan konseptualisasi Harvey dan Green (1993) tentang kualitas sebagai *kesesuaian dengan tujuan*, banyak pemimpin sekolah mendekati perencanaan QA sebagai sarana untuk menyelaraskan tujuan institusional dengan tuntutan mendesak lingkungan pembelajaran jarak jauh dan hybrid. Hal ini memerlukan pergeseran dari model berbasis kepatuhan ke praktik perencanaan yang lebih dinamis dan responsif, dengan penekanan pada pengambilan keputusan berbasis data, strategi pendidikan inklusif, dan kelangsungan pembelajaran. Selain itu, penelitian oleh Stensaker dan Leiber (2015) menekankan bahwa perencanaan QA yang efektif dalam kondisi krisis harus adaptif, iteratif, dan terintegrasi secara mendalam dengan proses pembelajaran organisasi. Oleh karena itu, fase perencanaan QA selama pandemi tidak hanya tentang memenuhi standar akreditasi eksternal, tetapi juga tentang memastikan ketahanan pedagogis dan akuntabilitas institusional di tengah ketidakpastian sistemik.

Perencanaan QA sebagai Tata Kelola Strategis dan Kolaboratif

Data lapangan menunjukkan bahwa kepala sekolah secara kolaboratif mengembangkan rencana Jaminan Mutu (QA) strategis yang melibatkan guru, orang tua, komite sekolah, dan

pemangku kepentingan lainnya. Pendekatan partisipatif ini memprioritaskan tiga domain inti: (1) memperkuat efektivitas dan fleksibilitas penyampaian pembelajaran, (2) menumbuhkan kerja sama tim yang kolaboratif dan lintas fungsi, dan (3) memastikan ketahanan operasional melalui inovasi yang responsif terhadap konteks. Prioritas strategis ini muncul sebagai respons adaptif terhadap gangguan pendidikan dan batasan struktural yang ditimbulkan oleh pandemi COVID-19, dengan tujuan utama menjaga kelangsungan layanan dan mempertahankan kualitas institusional.

Penelitian kontemporer menekankan bahwa perencanaan QA yang kokoh tidak hanya memerlukan visi dan keselarasan dengan tujuan institusional, tetapi juga mobilisasi sistemik sumber daya manusia, pedagogis, dan material (Liu, 2020). Sesuai dengan hal ini, sekolah-sekolah dalam studi ini mengembangkan sistem manajemen kualitas internal yang berakar pada proses evaluasi diri partisipatif. Sistem ini secara aktif melibatkan berbagai aktor pendidikan—termasuk kepemimpinan sekolah, guru, orang tua, alumni, dan komite sekolah—mencerminkan model pengembangan program kolaboratif dan tata kelola institusional reflektif yang diusulkan oleh Rockwell dan Bennett (2004).

Selain itu, proses perencanaan QA yang inklusif ini sejalan dengan mandat Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah (BAN-S/M, 2022), yang menekankan peran penting keterlibatan pemangku kepentingan dalam kerangka akuntabilitas institusional. Laporan evaluasi diri yang dihasilkan secara langsung menjadi dasar penyusunan *Rencana Kerja Sekolah (RKS)* dan *Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS)*. Dokumen-dokumen ini menetapkan target konkret untuk peningkatan pedagogis, alokasi sumber daya strategis, dan perbandingan kinerja. Pendekatan ini mencerminkan pergeseran yang diidentifikasi oleh Ríos (2015) menuju budaya kualitas terintegrasi—di mana prinsip-prinsip QA tidak hanya tertanam dalam mekanisme penilaian tetapi juga di seluruh lapisan praktik institusional. Zahro (2018) lebih lanjut mendukung pandangan ini dengan menegaskan bahwa model perencanaan yang mengharmoniskan evaluasi internal dan keterlibatan kolaboratif mendorong perbaikan pendidikan yang berkelanjutan, terutama dalam periode ketidakpastian dan transisi.

Implementasi QA

Implementasi Jaminan Kualitas (QA) di sekolah untuk siswa dengan kebutuhan khusus selama pandemi COVID-19 ditandai oleh keterlibatan kolektif semua unit institusi dalam mengimplementasikan tujuan strategis yang direncanakan. Pelaksanaan kolaboratif ini melampaui kepatuhan prosedural, mencerminkan komitmen institusional bersama untuk mewujudkan visi sekolah dan selaras dengan *Standar Nasional Pendidikan (SNP)*—delapan standar pendidikan nasional Indonesia (BAN-S/M, 2022).

Implementasi QA secara sistematis diintegrasikan melalui pembentukan unit QA internal atau *Tim Penjaminan Mutu Internal (TPMI)*, yang berfungsi sebagai inti operasional dalam memastikan kepatuhan terhadap tolok ukur SNP. Tim internal ini bertanggung jawab atas pemantauan kualitas di berbagai bidang, termasuk relevansi kurikulum, efektivitas pedagogis, hasil belajar siswa, kompetensi pendidik, tata kelola, infrastruktur, praktik penilaian, dan manajemen keuangan. Secara khusus, tim kurikulum memainkan peran sentral dalam menyelaraskan desain instruksional dengan indikator QA dan menyesuaikan konten

pembelajaran untuk memenuhi kebutuhan kontekstual dan spesifik peserta didik (Gamboa & Melão, 2012). Hal ini memastikan bahwa QA tidak dipandang sebagai latihan birokratis, melainkan sebagai motor penggerak relevansi dan responsivitas pendidikan.

Di tengah keterbatasan akibat pandemi, implementasi QA di sekolah-sekolah khusus menunjukkan ketahanan institusional melalui adopsi model pembelajaran hybrid dan alat pemantauan digital. Guru diwajibkan untuk merevisi metode pengajaran dan mengembangkan strategi instruksional inklusif yang mengakomodasi kemampuan dan kondisi sosial-emosional siswa yang beragam. Seperti yang diargumenkan oleh Brown et al. (2019), sistem QA yang efektif harus responsif secara budaya dan adaptif, terutama di lingkungan belajar yang termarginalisasi. Konteks pandemi ini memicu inovasi pedagogis dan menyoroti pentingnya *fleksibilitas* sebagai dimensi kualitas dalam sistem pendidikan inklusif. Penelitian lebih lanjut menunjukkan bahwa implementasi QA paling efektif ketika terintegrasi dengan budaya sekolah yang positif, kepemimpinan yang terdistribusi, dan pengembangan profesional guru yang berkelanjutan (To dkk., 2012; Chen & Hou, 2016). Alih-alih memandang QA sebagai tugas administratif terpisah, sekolah-sekolah yang sukses memandangnya sebagai proses pembelajaran berkelanjutan yang melibatkan seluruh institusi. Orientasi holistik ini memungkinkan praktik QA memperkuat tujuan institusional yang lebih luas, seperti memperkuat kompetensi lulusan, mendukung transisi siswa ke pendidikan lanjut atau pekerjaan, dan meningkatkan pengalaman belajar secara keseluruhan (Fitrah, 2018).

Pada dasarnya, implementasi QA selama pandemi bukan hanya tentang mempertahankan standar pendidikan, tetapi tentang merancang ulang kualitas melalui kolaborasi, inklusi, dan respons strategis terhadap tantangan yang muncul.

Evaluasi QA

Evaluasi proses Jaminan Mutu (QA) dalam studi ini dilakukan melalui mekanisme ganda yang melibatkan audit internal dan evaluasi eksternal. Secara internal, kepala sekolah dan *tim jaminan mutu internal* (TPMI) memimpin penilaian terstruktur untuk mengidentifikasi celah kinerja, mendokumentasikan ketidaksesuaian, dan menginisiasi rencana tindakan korektif. Penilaian ini tidak terbatas pada pemantauan kepatuhan tetapi berfungsi sebagai alat kritis untuk pembelajaran institusional yang reflektif (Sugiyanta, 2016). Secara eksternal, pengawas dari Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah (BAN-S/M) melakukan evaluasi akreditasi berdasarkan *Instrumen Akreditasi Satuan Pendidikan* (IASP) 2020, dengan penekanan pada keselarasan praktik sekolah dengan delapan standar pendidikan nasional Indonesia (BAN-S/M, 2022).

Audit internal berfungsi sebagai landasan untuk penilaian diri strategis, memungkinkan pemimpin untuk mengevaluasi keselarasan antara perencanaan, implementasi, dan hasil. Menurut kepala kurikulum, proses audit memfasilitasi identifikasi kelemahan sistemik dan kekuatan institusional, yang mengarah pada formulasi strategi perbaikan yang ditargetkan. Hal ini sejalan dengan pernyataan Sameena (2020) bahwa evaluasi internal yang efektif mendorong perbaikan kualitas berkelanjutan melalui praktik reflektif dan pengambilan keputusan yang didukung bukti.

Yang lebih penting, evaluasi QA di sekolah-sekolah ini tidak dianggap sebagai aktivitas terpisah atau pasca-implementasi, melainkan sebagai bagian dari siklus umpan balik berkelanjutan—mengintegrasikan perencanaan, implementasi, penilaian, dan pembaruan. Alat evaluasi diri institusional (*Evaluasi Diri Sekolah*, EDS) berperan sebagai pendorong utama siklus ini, memfasilitasi respons dinamis terhadap kebutuhan siswa yang terus berkembang, terutama dalam konteks pendidikan khusus selama pandemi COVID-19 (Sasmito et al., 2020). Temuan evaluasi tidak hanya menginformasikan penyempurnaan strategi pembelajaran tetapi juga prioritas tujuan pengembangan dalam dokumen seperti *Rencana Kerja Sekolah* (RKS) dan *Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah* (RKAS).

Selain itu, data akurat dan andal yang diperoleh dari audit internal meningkatkan transparansi kinerja institusi dan mendukung mekanisme akuntabilitas, terutama dalam komunikasi dengan pemangku kepentingan dan pelaporan akreditasi. Seperti yang dicatat oleh Ríos (2015), mengintegrasikan evaluasi ke dalam budaya kualitas yang lebih luas memastikan sekolah beralih dari kepatuhan reaktif menjadi pengembangan kualitas proaktif. Demikian pula, Rockwell dan Bennett (2004) menekankan bahwa evaluasi yang didasarkan pada metodologi partisipatif dan berbasis data berkontribusi pada transformasi institusi yang berkelanjutan.

Pendekatan komprehensif dan siklikal ini dalam evaluasi QA mencerminkan prioritas nasional dan praktik terbaik internasional dalam sistem kualitas pendidikan. Dengan memastikan bahwa proses pengambilan keputusan didasarkan pada indikator yang dapat diverifikasi dan realitas kontekstual, sekolah tidak hanya mempertahankan akreditasi tetapi juga mendorong perbaikan yang bermakna dan berkelanjutan yang selaras dengan kebutuhan siswa dan tujuan institusional.

Sintesis dan Implikasi yang Lebih Luas

Temuan studi ini menegaskan bahwa Jaminan Kualitas (QA) di sekolah untuk siswa dengan kebutuhan khusus harus adaptif, inklusif, dan berbasis bukti. Di seluruh tahap perencanaan, implementasi, dan evaluasi, praktik QA tetap berfungsi dan efektif, meskipun terjadi gangguan yang mendalam akibat pandemi COVID-19. Ketahanan ini dapat dikaitkan dengan faktor-faktor pendukung institusional: kepemimpinan strategis, tata kelola kolaboratif, dan keselarasan dengan standar pendidikan nasional. Alih-alih menjadi mekanisme kepatuhan, QA dalam konteks ini beroperasi sebagai proses dinamis—menggerakkan agen kolektif untuk menjaga keadilan pendidikan dan akuntabilitas institusional.

Studi ini memperkuat dan memperluas temuan penelitian sebelumnya oleh Brown dkk. (2022), yang menekankan bahwa kepemimpinan yang responsif terhadap budaya dan keterlibatan multi-pemangku kepentingan merupakan hal yang esensial bagi sekolah-sekolah yang berorientasi pada pembelajaran dalam menghadapi ketidakpastian pendidikan dan mempertahankan praktik-praktik inklusif. Kepemimpinan di sekolah-sekolah ini tidak hanya bersifat instruktif tetapi juga transformatif—menciptakan tujuan bersama dan memfasilitasi inovasi dalam pengajaran, adaptasi kurikulum, dan penyampaian layanan. Temuan ini sejalan dengan model kepemimpinan terdistribusi, yang semakin diakui sebagai elemen integral dalam jaminan kualitas (QA) yang efektif di lingkungan sekolah yang kompleks dan beragam (Leithwood dkk., 2020).

Selain itu, hasil penelitian ini menguatkan argumen Wang et al. (2018) bahwa ketahanan institusional—kehadiran sistem yang kohesif, struktur akuntabilitas internal, dan transparansi data—merupakan unsur dasar kualitas pendidikan yang berkelanjutan. Sekolah-sekolah dalam studi ini menunjukkan bagaimana sistem QA internal, seperti evaluasi diri institusional dan proses audit, berfungsi sebagai mekanisme umpan balik reflektif yang mendorong pembelajaran organisasi dan perbaikan berulang.

Dari perspektif kebijakan, studi ini memberikan dukungan empiris bagi kerangka kerja QA internasional yang mengadvokasi siklus perbaikan berkelanjutan, terutama yang diuraikan oleh Gamboa dan Melão (2012) dan Liu (2020). Kerangka kerja ini menekankan integrasi mekanisme QA internal (penilaian diri, perencanaan tingkat sekolah) dan eksternal (akreditasi, pengawasan kebijakan) dalam budaya institusional yang berorientasi pada kualitas. Pendekatan sistem ganda ini menciptakan jalur terstruktur namun fleksibel untuk mencapai keunggulan, terutama di lingkungan yang melayani siswa rentan atau termarjinalkan.

Dalam konteks pendidikan inklusif dan kebutuhan khusus, implikasi yang lebih luas jelas: QA harus berkembang melampaui tolok ukur statis menjadi proses yang sensitif terhadap konteks dan partisipatif. Hal ini mencakup penanaman nilai-nilai QA—seperti inklusivitas, responsivitas, dan adaptabilitas—ke dalam praktik pedagogis dan manajerial sehari-hari sekolah. Dengan demikian, pengembangan pendidikan berkualitas bagi siswa dengan kebutuhan khusus tidak dapat dipisahkan dari pembentukan budaya kualitas yang menghargai martabat manusia, instruksi yang dibedakan, dan ketahanan institusional.

Kesimpulan

Studi ini mengeksplorasi bagaimana Jaminan Kualitas (QA) diterapkan di sekolah-sekolah kebutuhan khusus selama pandemi COVID-19. Studi ini menyoroti bagaimana sekolah terlibat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi QA sebagai bagian dari upaya akreditasi mereka, sambil juga menangkap perspektif pemimpin sekolah tentang peran QA dalam akuntabilitas institusional. Menggunakan standar akreditasi 2022 yang dikembangkan oleh Badan Akreditasi Nasional untuk Sekolah/Madrasah (BAN-S/M), analisis ini berfokus pada empat komponen kritis: hasil belajar siswa, efektivitas pengajaran dan pembelajaran, profesionalisme guru, dan tata kelola sekolah secara keseluruhan.

Berdasarkan temuan yang dibahas di atas, dapat disimpulkan bahwa implementasi dan evaluasi sistem Jaminan Mutu (QA) untuk siswa dengan kebutuhan khusus dilakukan melalui proses yang terstruktur dan partisipatif. Proses ini melibatkan perencanaan sistematis, keterlibatan inklusif pemangku kepentingan sekolah, dan mekanisme evaluasi berkelanjutan. Integrasi yang sukses dari delapan Standar Pendidikan Nasional (SNP) menunjukkan bahwa kerangka kerja QA yang diterapkan di lembaga pendidikan ini efektif dalam menjaga kualitas layanan akademik dan administratif selama pandemi COVID-19.

Studi ini menyoroti bahwa implementasi QA di sekolah yang melayani siswa dengan kebutuhan khusus memerlukan strategi yang disesuaikan, yang mencakup kepemimpinan inklusif, kolaborasi antar pemangku kepentingan, dan pengambilan keputusan berbasis data. Praktik-praktik ini memastikan bahwa perencanaan sekolah, pengiriman instruksi yang ber , dan proses evaluasi selaras dengan standar nasional dan kebutuhan unik populasi siswa.

Akibatnya, wawasan yang dihasilkan dari penelitian ini dapat menjadi acuan untuk pengembangan dan keberlanjutan model manajemen pendidikan berbasis QA di konteks serupa. Namun, cakupan studi ini terbatas pada sekolah untuk siswa dengan kebutuhan khusus dan mungkin tidak dapat diterapkan secara umum di semua lingkungan pendidikan. Batasan ini membuka peluang bagi penelitian lebih lanjut untuk mengkaji praktik QA di lingkungan pendidikan yang beragam, seperti sekolah umum, lembaga vokasi, atau pendidikan tinggi, sehingga memperkaya diskusi yang lebih luas tentang kualitas pendidikan dan kepatuhan terhadap akreditasi. Selain itu, penelitian ini menyoroti pentingnya kepemimpinan yang responsif dalam implementasi sistem QA. Kepemimpinan yang peka terhadap pengalaman nyata siswa, serta perspektif dan kebutuhan pendidik, memainkan peran krusial dalam memastikan bahwa kebijakan QA tidak hanya secara administratif kuat tetapi juga secara pedagogis bermakna. Sayangnya, suara siswa—terutama pengalaman mereka dalam menavigasi sistem sekolah—seringkali kurang terwakili dalam diskursus QA. Studi ini menyarankan bahwa kerangka kerja QA yang komprehensif harus mengintegrasikan umpan balik siswa sebagai indikator kunci efektivitas institusi, terutama terkait dengan standar akreditasi. Secara ringkas, jaminan mutu dalam pendidikan, terutama dalam konteks kebutuhan khusus, harus melampaui kepatuhan untuk menjadi praktik yang reflektif, inklusif, dan responsif. Hal ini harus didasarkan pada partisipasi pemangku kepentingan, kepemimpinan strategis, dan perbaikan berkelanjutan untuk benar-benar meningkatkan hasil belajar dan kualitas sekolah.

Referensi

- Al-Alawi, A., El-Sobkey, H., & Al-Sobayel, H. (2021). Menilai dampak standar akreditasi terhadap jaminan mutu dan manajemen risiko di pendidikan tinggi: Persepsi dosen. *Academy of Educational Leadership Journal*.
- BAN-S/M. (2022). *Instrumen Akreditasi Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah (IASP 2020)*. Jakarta: Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah.
- Belawati, T. (2004). Penerapan sistem jaminan mutu dalam pembelajaran terbuka dan jarak jauh: Studi kasus di Universitas Terbuka Indonesia. *The International Review of Research in Open and Distance Learning*, 5(2).
- Brennan, J., & Shah, T. (2000). *Mengelola kualitas dalam pendidikan tinggi: Perspektif internasional tentang penilaian institusional dan perubahan*. Open University Press.
- Brockerhoff, L., Huisman, J., & Laufer, M. (2020). Jaminan kualitas dalam pendidikan tinggi: Tinjauan sistematis literatur yang direview oleh rekan sejawat. *Research in Higher Education*, 61(3), 311–336. <https://doi.org/10.1007/s11162-019-09515-1>
- Daniel, L., & Fenty, N. (2020). Jaminan kualitas dalam pendidikan jarak jauh dan e-learning: Keselarasan antara kebijakan dan praktik. Dalam *Jaminan Kualitas dalam Pendidikan Jarak Jauh dan E-Learning* (hal. 13–38). IDRC.
- Ishak, D. (2021). Implementasi kebijakan jaminan kualitas pendidikan: Antara harapan dan kenyataan. *Jurnal Pendidikan Indonesia*, 2(1), 1–15.

- Khan, S., & Mirza, A. (2020). Mendorong praktik jaminan mutu berkelanjutan dalam pendidikan berbasis hasil: Pelajaran dari akreditasi ABET program komputasi. *Sustainability*, 12(20), 8380.
- Lestari, R., Idrus, A., Hadiyanto, H., & Sulistiyo, U. (2023). Implementasi sistem jaminan mutu terpadu dalam meningkatkan kualitas pembelajaran. *PPSDP International Journal of Education*, 2(2), 400–407.
- Mukhlisin, M. K., Ulfatin, N., & Muyassaroh. (2023). Implementasi sistem jaminan mutu internal dalam meningkatkan kualitas pendidikan sekolah menengah atas: Tinjauan pustaka sistematis. *English Language Teaching Journal*.
- OECD. (2013). *Sinergi untuk pembelajaran yang lebih baik: Perspektif internasional tentang evaluasi dan penilaian*. OECD Publishing. <https://doi.org/10.1787/9789264190658-en>
- Santiago, P., Donaldson, G., Herman, J., & Shewbridge, C. (2011). *Ulasan OECD tentang Evaluasi dan Penilaian dalam Pendidikan: Australia 2011*. OECD Publishing. <https://doi.org/10.1787/9789264116672-en>
- Schwarz, S., & Westerheijden, D. F. (Eds.). (2004). *Akreditasi dan evaluasi di kawasan pendidikan tinggi Eropa*. Springer. <https://doi.org/10.1007/978-94-007-0957-6>
- Stensaker, B., & Leiber, T. (2015). Menilai dampak organisasional dari jaminan mutu: Beberapa pertimbangan teoretis dan metodologis. *Kualitas dalam Pendidikan Tinggi*, 21(3), 288–311. <https://doi.org/10.1080/13538322.2015.1111006>
- Subijanto, Kadaryanto, Ali, Sulistiono, & Martini. (2021). Sistem jaminan mutu pembelajaran jarak jauh di perguruan tinggi selama pandemi COVID-19. *Jurnal Penelitian Kebijakan Pendidikan*, 14(2).
- Kebijakan Jaminan Mutu Berkelanjutan di Perguruan Tinggi Indonesia. (2021). Jaminan mutu untuk pendidikan tinggi berkelanjutan: Pendekatan model persamaan struktural. *Sustainability*, 13(9), 4954.
- Tam, M. (2001). Pengukuran kualitas dan kinerja dalam pendidikan tinggi. *Quality in Higher Education*, 7(1), 47–54. <https://doi.org/10.1080/13538320120045076>
- UNESCO. (2021). *Jaminan mutu dan akreditasi: Kamus istilah dasar dan definisi*. Paris: UNESCO Institute for Lifelong Learning. Diakses dari <https://unesdoc.unesco.org/>
- Zhao, C. M., & Kuh, G. D. (2004). Menambah nilai: Komunitas belajar dan keterlibatan mahasiswa. *Penelitian dalam Pendidikan Tinggi*, 45(2), 115–138. <https://doi.org/10.1023/B:RIHE.0000015692.88534.de>
- Zuhairi, A., Raymundo, M. R. D. R., & Mir, K. (2020). Implementasi sistem jaminan mutu untuk pembelajaran terbuka dan jarak jauh di tiga universitas terbuka di Asia: Filipina, Indonesia, dan Pakistan. *Jurnal Asosiasi Universitas Terbuka Asia*.